

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
(SAP), PENGETAHUAN PENGELOLA DAN KETERSEDIAAN
SARANA PRASARANA TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada SKPD di Kabupaten Kuantan Singingi)**

Oleh:

Dewi Sartika

Pembimbing : Zulbahridardan Lila Anggraini

Faculty Of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : ajha.dewi91@yahoo.com

*Effect of Application of Government Accounting Standards (SAP),
Knowledge Infrastructure Facilities Management and
Availability of The Quality Of Local Government
Financial Statements
(Studies in SKPD in Kuantan Singingi)*

ABSTRACT

This study aimed to test the effect of the application of accounting standards related to the government, the management of knowledge and the availability of infrastructure to the quality of the financial statements in the local government district Singingi strength. Data was collected by distributing questionnaires to the respondents. The population used in this study is a staff / staff involved in the preparation of the budget, the number of samples taken by 84 people and the samples can be processed. The data analysis technique used to test the hypothesis of the research is multiple linear regression analysis using SPSS software version 20.0. These results indicate two variables affect the quality of financial reports and only one variable that does not have an influence on the quality of financial reporting. Two variables that affect the application of accounting standards (SAP), and knowledge managers. While the availability of infrastructure had no effect on the quality of the financial statements.

Keywords: government's application of accounting standards (SAP), knowledge managers, facility infrastructures, and quality of financial reporting.

PENDAHULUAN

Kualitas laporan keuangan, Menurut Hariadi dkk (2010: 125) adalah ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi dalam

laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat, telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, terdiri dari: 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan dan 4) dapat

dipahami.

Isu mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya opini *disclaimer* di beberapa instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Opini *disclaimer* diberikan terhadap laporan keuangan karena Badan Pengawas Keuangan mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan, penyediaan sarana dan prasarana yang belum memadai dan kurangnya pengetahuan staf pengelola yang ada. Dalam penelitian ini hanya mengambil tiga faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan tersebut.

Faktor yang pertama adalah standar akuntansi pemerintah, dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah suatu standar, pedoman-pedoman, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah baik pusat maupun daerah. Sehingga, dengan adanya Standar Akuntansi ini maka setiap laporan keuangan pemerintah harus disesuaikan berdasarkan standar ini. Laporan Keuangan merupakan gambaran kinerja suatu pemerintahan selama satu periode tertentu untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan pemerintah tersebut.

Standar akuntansi pemerintah (SAP) sangat penting dalam menentukan kualitas laporan karena merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. pengguna laporan keuangan termasuk legislatif menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Hariadi, dkk, 2010:115). Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Faktor yang kedua adalah pengetahuan pengelola merupakan faktor dari kualitas laporan keuangan, untuk memperoleh laporan berkualitas pemerintah harus memiliki staf pengelola yang memiliki pengetahuan dalam pengelolaan laporan. Pengetahuan pengelola adalah ilmu dan kemampuan dalam menjelaskan interaksi antara orang dan sistem serta implementasi sistem dan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas dari sebuah informasi. Keandalan sistem harus juga didukung oleh keandalan staf pengelola. Namun pengelolaan laporan yang telah dilakukan harus sesuai standar akuntansi pemerintah agar dapat menyusun laporan keuangan dengan andal (Romilia, 2011).

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, setiap SKPD harus memiliki sumber daya manusia (staf pengelola) yang kompeten dan memiliki pengetahuan yang dicerminkan dari latar belakang pendidikannya, dalam hal ini sumber daya manusia harus benar-benar mengerti tentang akuntansi melalui pendidikan maupun pelatihan.

Didalam menjalankan fungsi akuntansi diperlukan pengetahuan tidak hanya mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan saja, tetapi juga diperlukan pengetahuan dalam menentukan pilihan perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi, merancang,serta menganalisis sistem yang ada agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, pendidikan mempunyai peran yang sangat penting karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat.

Faktor ketiga adalah ketersediaan Sarana prasarana, adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan untuk tercapainya visi dan misi, karena apabila sarana dan prasarana tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Ketersediaan sarana dan prasarana yang tepat akan bisa mendukung terwujudnya penerapan standar akuntansi pemerintah berjalan dengan efektif.

Penelitian terdahulu Purwaniati Nugraheni, Imam Subaweh (2008) dengan judul menganalisis pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB dalam penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pada Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, pengaruh ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam penerapan SAP terhadap kualitas

laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, menunjukkan bahwa sap berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB dan ketersediaan sarana dan prasarana berpengaruh dalam dengan tingkat sedang terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini berbeda dengan Penelitian Sulani (2009) yang meneliti perangkat pendukung terhadap keberhasilan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, menghasilkan kesimpulan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Dari uraian di atas maka peneliti ingin meneliti kembali mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah karena masih terdapatnya perbedaan hasil temuan dari peneliti sebelumnya, sehingga perlu diuji ulang dengan maksud untuk mendapatkan konsistensi dari teori yang digunakan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini peneliti lebih fokus terhadap tiga faktor dari laporan keuangan itu sendiri yang dianggap dapat mengancam kualitasnya, seperti faktor penerapan standar akuntansi pemerintah, pengetahuan pengelola, dan ketersediaan sarana prasarana.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: (1) Apakah ada pengaruh yang signifikan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Apakah ada pengaruh signifikan pengetahuan pengelola terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (3) Apakah ada

pengaruh ketersediaan sarana dan prasarana terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) apakah standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (2) apakah pengetahuan pengelola berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (3) apakah ketersediaan sarana dan prasarana berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teoritis

a. Kualitas laporan keuangan

Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan (Iman Mulyana 2010). Laporan keuangan adalah media bagi suatu entitas pemerintah untuk mewujudkan pertanggungjawaban kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi

informasi jika memiliki kualitas yang tinggi, baik dan mudah dipahami.

b. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah” SAP diterapkan di ruang lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan undang-undangan satuan organisasi di maksud wajib menyajikan laporan keuangan, maka laporan tersebut harus disajikan dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah agar pemerintah pusat maupun daerah mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan). Dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para *stakeholder* antara lain: pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif), investor, kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

c. Pengetahuan Pengelola

Pemilikan pengetahuan khusus adalah penentuan keahlian yang mana pengetahuan tersebut diperoleh melalui pengalaman kerja selama bertahun-tahun. Kemudian dapat dikatakan bahwa dalam rangka pencapaian keahlian, seseorang pengelola keuangan harus

mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidangnya. Pengetahuan ini bisa didapat dari pendidikan formal yang dikembangkan dan pelatihan.

Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai pengetahuan yang dimiliki akan memberikan hasil yang lebih baik dari pada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan cukup atas tugasnya, dengan kata lain laporan keuangan yang di susun dan dikelola oleh pengelola yang berpengetahuan akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Pengetahuan pengelola merupakan kemampuan, kompetensi, ilmu dan pengetahuan yang didapatkan baik secara formal, yaitu pendidikan maupun melalui pelatihan yang pernah diikuti oleh suatu instansi untuk mengelola dan melaksanakan kegiatannya.

Pengetahuan pengelola di bidang akuntansi merupakan suatu hal sangat penting dalam organisasi ataupun pemerintah untuk mencapai tujuannya. Pengetahuan pengelola yang cukup memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Adapun tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasional pemerintah.

d. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana adalah suatu ukuran tentang tingkat pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi karena tanpa adanya sarana yang memadai mustahil rencana-rencana kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai, oleh sebab itu bagi instansi

pemerintah harus memperhatikan mengenai kebutuhan akan perlengkapan kantor yang digunakan dalam operasional, untuk memastikan kualitas laporan keuangan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Sarana prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan untuk tercapainya visi dan misi, karena apabila sarana dan prasarana tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan menacapai hasil dan kualitas yang diharapkan sesuai dengan rencana. Ketersediaan sarana dan prasarana yang tepat akan bisa mendukung terwujudnya penerapan standar akuntansi pemerintah berjalan dengan efektif.

Kerangka Pemikiran

a. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

PP 71 Tahun 2010 menyebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya dalam PP tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka perlu diterapkannya SAP. Penerapan SAP yang sesuai dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan penentu atas kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

b. Pengaruh Pengetahuan Pengelola terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengetahuan pengelola di bidang akuntansi merupakan suatu hal sangat penting dalam organisasi ataupun pemerintah untuk mencapai tujuannya. Pengetahuan pengelola yang cukup memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Adapun tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasional pemerintah.

c. Pengaruh sarana prasarana terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sarana prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan untuk tercapainya visi dan misi, karena apabila sarana dan prasarana tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan menacapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Ketersediaan sarana dan prasarana yang tepat akan bisa mendukung terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas.

Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mendukung untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan menerapkan SAP. Ketersediaan sarana dan prasarana disini lebih menekankan pada: Sarana ruangan, berupa tempat kerja atau kantor. Sarana administrasi, berdasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah, sistem akuntansi pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Perkembangan prasarana yang sangat pesat, yang terjadi pada perangkat keras untuk itu dibutuhkan perangkat pendukung, berupa perangkat keras, dukungan anggaran yang memadai dan perangkat lunak berupa aplikasi program yang ditawarkan untuk mempermudah pekerjaan dan menghemat waktu dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP.

Hipotesis penelitian

Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proporsi yang dapat diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran yang digambarkan pada model penelitian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

$H\alpha_1$ = penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

$H\alpha_2$ = pengetahuan staf pengelola berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

$H\alpha_3$ = ketersediaan sarana prasarana berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh variabel independen yaitu penerapan standar

akuntansi pemerintah, pengetahuan pengelola dan sarana prasarana terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah bendahara daerah, kasubag keuangan, dan staf keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah di Kabupaten Kuantan Singing dengan jumlah SKPD sebanyak 28 SKPD. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode sensus, sehingga semua populasi dijadikan sampel. Responden dalam penelitian ini adalah bendahara daerah, kasubag keuangan, dan staf keuangan, sehingga tiap SKPD ditetapkan sebanyak 3 orang yang menjadi responden. Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa bendahara daerah, kasubag keuangan, dan staf keuangan merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan SKPD dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Metode Analisis Data

a. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2012).

b. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya kuisioner, oleh sebab itu, uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana validitas data yang diperoleh dari penyebaran kuisioner.

c. Uji Reliabilitas

Uji reabilitas dilakukan dengan maksud untuk mengetahui seberapa besar tingkat keabsahan sehingga

dapat menghasilkan data yang memang benar-benar sesuai dengan kenyataan dan dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda.

d. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi residual mengikuti atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Normal P-Plot of regression standardized* residual terhadap pengujian pada keseluruhan variabel dalam penelitian ini. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2009: 107).

e. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat pada *tolerance value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila *tolerance value* dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10 maka terjadi multikolinieritas. Apabila ternyata terdapat multikolinieritas, maka salah satu variabel harus dikeluarkan dari persamaan (Ghozali, 2009: 25).

f. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2013) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau

melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas, serit titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas .

g. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu. Ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson* (DW).

Analisis Regresi Berganda

Metode regresi berganda yaitu metode statistik untuk menguji hubungan antara beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan regresi berganda dengan menggunakan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS), dengan model persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan

Keuangan Daerah

X₁ = Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintah

X₂ = Pengetahuan Pengelola

X₃ = Ketersediaan sarana

prasarana

α = Konstansa

β_{1,2,3} = Koefisien Regresi

e = error

Uji Goodness of Fit

Goodness of Fit Test digunakan untuk menguji kelayakan model atau seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varian variabel terikatnya. Untuk

mengetahui hasil uji goodnes of fit menggunakan dua uji yaitu uji r dan uji f. Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam memvariasi variabel dependen. Sedangkan uji F bertujuan untuk menguji secara serempak (simultan) antara keseluruhan variabel independent terhadap variabel dependen.

Uji Statistik (t)

Uji t dilakukan untuk melihat atau menguji apakah tiap-tiap variabel bebas (independen) memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (dependen), dan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan signifikan/tidak dengan variabel terikat secara individual untuk setiap variabel.

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif variabel dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	N	Mean	Std. Deviation
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X ₁)	84	32.25	3.62014
Pengetahuan Pengelola (X ₂)	84	50.3452	4.62704
Sarana Prasarana (X ₃)	84	33.5476	4.03122
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	84	50.0833	4.20616
Valid N (listwise)	84		

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 20.0, 2015

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas dan uji reabilitas dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang

dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel, hal ini terlihat dari nilai r_{hitung} seluruh indikator variabel lebih besar dari r_{tabel} $n = 84$, $\alpha 5\% = 0,215$. Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2 berikut ini.

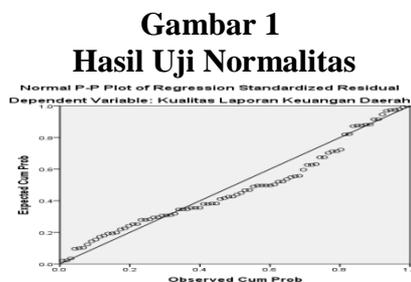
Tabel 2
Hasil Uji Realibilitas Data

NO	Instrument Variabel Penelitian	Nilai Cronbach's Alpha
1	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,805
2	Penerapan SAP (X ₁)	0,783
3	Pengetahuan pengelola (X ₂)	0,778
4	Sarana Prasarana (X ₃)	0,826

Sumber : Pengolahan Data SPSS 20.0, 2015

Hasil Uji Normalitas

Pada penelitian ini, data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya pada grafik P-Plot, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.



Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 20.0, 2015

Hasil Uji Multikolinearitas

Pada penelitian ini, nilai *tolerance* berada diantara 0.1-1.0, dan nilai VIF diantara 1.0-10. Dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi multikolinieritas.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0.944	1.059
	Pengetahuan Pengelola	0.874	1.145
	Sarana Prasarana	0.911	1.097

Sumber : Pengolahan Data SPSS 20.0, 2015

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini, grafik *scatter plot* memiliki titik-titik yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Hasil perhitungan menunjukkan nilai DW sebesar 1.908, yang berarti tidak terjadi autokorelasi karena nilai DW berkisar di antara -2 sampai dengan +2.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson	N	Keterangan
1.908	84	Tidak terdapat Autokorelasi

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 20.0, 2015

Hasil Uji goodness of fit

Berdasarkan uji R menunjukkan bahwa bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 41,3%. Artinya 58,7 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.521 ^a	0.442	0.413	3.65804
a. Predictors: (Constant), Sarana Prasarana, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengetahuan Pengelola				
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah				

Sumber : Pengolahan Data SPSS 20.0, 2015

Sedangkan berdasarkan hasil F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 9.912 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel-variabel independen meliputi penerapan standar akuntansi pemerintah, pengetahuan pengelola, ketersediaan sarana prasarana secara bersama-sama atau model regresi yang terbentuk signifikan untuk digunakan dalam analisis.

Tabel 6
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	397.917	3	132.639	9.912	0.000 ^b
	Residual	1070.500	80	13.381		
	Total	1468.417	83			
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah						
b. Predictors: (Constant), Sarana Prasarana, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengetahuan Pengelola						

Sumber : Pengolahan Data SPSS 20.0, 2015

Hasil Analisis Berganda

Persamaan regresi linear berganda dari model penelitian menjadi sebagai berikut:

$$Y = 26.924 + 0.378X_1 + 0.329X_2 - 0.166X_3 + e$$

Arti angka-angka dalam persamaan regresi diatas:

- Nilai konstanta (a) sebesar 26.924. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka kualitas laporan keuangan daerah sebesar 26.924
- Nilai koefisien regresi variabel penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 0.378. Artinya adalah bahwa setiap pemanfaatan teknologi informasi sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah sebesar 0.378 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel sistem pengetahuan pengelola sebesar 0.329. Artinya adalah bahwa setiap penerapan sistem pengendalian intern sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah sebesar 0.329 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel ketersediaan sarana prasarana sebesar -0.166. Artinya adalah bahwa setiap penerapan komitmen organisasi sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah sebesar -0.166 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Standar error (e) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan.

Hasil Uji Statistik (t)

Tabel 7
Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Coefficients ^a			T	S i g .
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1.(Constant)	26.924	5.504		4.892	.000
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0.378	0.114	0.325	3.310	0.001
Pengetahuan Pengelola	0.329	0.093	0.362	3.542	0.001
Sarana Prasarana	-0.166	0.104	-0.159	-1.595	0.115

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sumber : Pengolahan Data SPSS

a. Hasil Pengujian Hipotesis Satu (H₁)

Dari Tabel hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3.310 > 1,990$ dan $sig.t (0,000) > 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan **H₁ diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dapat dikatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah pada laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kuantan Singing sudah berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari jelasnya prosedur serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya juga dapat ditinjau dari pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Walaupun demikian, tetap diharapkan peran aktif semua elemen pada instansi bagi

peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Purwaniati Nugraheni, Imam Subaweh (2008) yang menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Kusumah (2012) yang menyatakan bahwa bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Vicky Agustiawan Lasoma (2013) yang menyatakan bahwa Hasil penelitian menunjukan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan arah positif. Serta penelitian Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Hasil Pengujian Hipotesis 2 (H₂)

Dari Tabel hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa variabel pengetahuan pengelola memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3.542 > 1,990$ dan $sig.t (0,000) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan **H₂ diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu pengetahuan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam pencapaian hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan seseorang harus ahli dan memiliki pengetahuan mengenai bidangnya dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, semakin tinggi pengetahuan

seseorang dalam bekerja maka semakin baik kualitas pekerjaannya, Oleh karena itu pengetahuan pengelolah sangat dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan, juga dalam pelaksanaan pertanggung jawaban kepada masyarakat, agar laporan keuangan yang disajikan dengan transparansi, akuntabilitas, tepat waktu, andal, relevan dan dapat dibandingkan.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Desiana (2012) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD kota Bandung. Serta penelitian Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi staf akuntansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Hasil Pengujian Hipotesis 3 (H3)

Dari Tabel hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa variabel sarana prasarana memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-1.595 < 1,990$ dan $sig.t (0,000) < 0,05$ dengan demikian H_0 diterima dan H_3 ditolak. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu sarana prasarana tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Secara umum pemanfaatan sarana prasarana pada instansi pemerintahan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kelemahan terjadi karena diduga pegawai kurang memanfaatkan sarana prasarana yang ada, tidak signifikan terhadap pemanfaatan sarana prasarana yang

masih terbatas, dan program aplikasi komputerisasi yang digunakan belum memenuhi kebutuhan pemakai dalam mengelola data menjadi laporan keuangan.

Hasil ini bertentangan dengan pendapat Purwaniati Nugraheni, Imam Subaweh (2008) yang menyatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana akan berpengaruh meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0.385 satuan, karena sarana dan prasarana akan bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dengan mudah, murah dan tepat waktu. Kenyataannya keberhasilan dalam penyajian laporan keuangan tidak hanya karena kecukupan sarana prasarana saja, namun juga pada pengelolaan 3 aspek utama, yaitu : a) *People*, mencakup *leadership*, kompetensi SDM, perubahan budaya, partisipasi masyarakat, b) *Process*, mencakup regulasi, alur kerja dan prosedur, c) *Infrastruktur* teknologi, jaringan dan sistem aplikasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data dalam pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dapat dilihat dari jelasnya prosedur serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya juga dapat ditinjau dari pengelolaan

keuangan yang relevan, andal, efektif, efisien, transparan serta akuntabel.

2. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel pengetahuan pengelola berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik pendidikan pegawai dan hasil pengelolaan laporan keuangannya.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel ketersediaan sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singing. Hal ini dikarenakan belum tepatnya penggunaan sarana dan prasarana, kurangnya pelatihan mengenai teknologi dan terbatasnya anggaran bagi pengembangan teknologi informasi itu sendiri.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengetahuan pengelola berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, Sedangkan ketersediaan sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kuantan Singing, maka peneliti memberikan saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama agar dapat menambahkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah, seperti

variabel dukungan pemimpin, komitmen organisasi, sistem pengendalian internal dan banyak lagi yang lainnya, Serta diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk memperbesar cakupan sampel yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA

- Desiana, 2012. *Pengaruh Dukungan Pemimpin dan Pengetahuan Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Daerah*. e- Journal Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.
- Famela ika kurnia, 2013. *Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung*. E- Journal Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Pendidikan Akuntansi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ghozali Imam, 2013. *Aplikasi metode Analisis Dengan Program SPSS Edisi ketiga*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Publik* Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi: Salemba Empat, Jakarta, 2004.
- Hariadi, Pramono, Yanuar E. Restiyanto dan I.R Bawono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit Alfabeta Bandung.

- Hartina, Silka. 2009. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Langkat. Skripsi Akuntansi Universitas Sumatera Utara.* pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan. e-Journal Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Pasca Sarjana Universitas Gunadarma.
- Indriasari, dessi, ertambang. 2008. *Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pemerintah kota Palembang dan kabupaten ogan ilir).* SNA x Pontianak.
- Kusumah (2012). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kaulitas Laporan Keuangan (Studi pada SKPD/OPD Pemerintah Kota).* e-journal program studi Akuntansi Universitas Siliwangi.
- Peraturan Pemerintah Nomor71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*
- Permana Irvan. 2012. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya pada Akuntabilitas Bandung.*
- Purwaniati Nugraheni, Imam Subaweh (2008). *Pengaruh penerapan standar akuntansi*
- Romilia Riana. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang SAP di Kabupaten Bangkalan.* Bangkalan: Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono, 2006, *Metoda Penelitian Bisnis*, Cetakan kesembilan, CV Alfabeta, Bandung.
- Sulani, Aldiani. (2009). *Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu.* Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara.
- Vicky Agustiawan Lasoma (2013). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kaulitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten gorontalo utara.* e-Journal Program Studi S1Akuntansi, Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo.